

ANALISIS KEBUTUHAN GURU UNTUK MENGANTISIPASI DAMPAK PENSIUN GURU YANG DIREKRUT SELAMA PELAKSANAAN INPRES SD DAN WAJIB BELAJAR 6 TAHUN

(Studi pada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat)

Oleh : Suryadi

Abstrak

Salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pembangunan pendidikan di Indonesia adalah ketersediaan guru yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan guru yang memadai dihadapkan pada dua masalah pokok, yakni pemenuhan kebutuhan tenaga guru yang belum sesuai dengan kebutuhan daerah dan peningkatan kualitas profesional yang belum memenuhi standar minimal

Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Jumlah guru yang akan pensiun, (2) Kualifikasi guru SD yang ada saat ini, (3) Sebaran guru yang akan pensiun, (4) Langkah-langkah dalam memasok kebutuhan guru, (5) Respon Pemerintah terhadap kondisi peniun masal, (6)antisipasi guru pengganti akibat pensiun masal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah : (1) Informasi mengenai kondisi (sebaran dan perbedaan) guru SD, baik secara kuantitas dan kualitas di berbagai daerah di Jawa Barat, (2) Proyeksi kebutuhan guru di setiap kabupaten/Kota mulai tahun 2004 sampai 2013 berdasarkan jumlah rombel, jumlah sekolah, jumlah guru yang ada dan jumlah guru yang akan pensiun pada tahun tersebut.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 akan terjadi pensiun massal guru PNS SD, Kualifikasi pendidikan guru SD dan MI di Indonesia masih perlu ditingkatkan, setidaknya minimal lulusan D2 PGSD, Jumlah guru SD/MI yang pensiun beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dari jumlah lulusan yang telah dihasilkannya, dapat disimpulkan bahwa kemampuan LPTK untuk menghasilkan tenaga

guru SD masih perlu ditingkatkan baik jumlah maupun mutu lulusan, Respon pemerintah daerah dalam mengatasi kekurangan dan pemenuhan kebutuhan guru ternyata cukup bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, Diprediksi bahwa kebutuhan guru SD/MI rata-rata lebih dari 100.000 orang setiap tahun diperlukan sebagai guru pengganti, puncaknya pada tahun 2013. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang paling banyak membutuhkan guru pengganti sebanyak 341.504 orang

Kata Kunci : Guru, Supplay, Demand

I. Pendahuluan

Salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pembangunan pendidikan di Indonesia adalah ketersediaan guru yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan guru yang memadai dihadapkan pada dua masalah pokok, yakni pemenuhan kebutuhan tenaga guru yang belum sesuai dengan kebutuhan daerah dan peningkatan kualitas profesional yang belum memenuhi standar minimal. Kedua permasalahan inilah yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya disparitas kualitas guru di berbagai daerah di tanah air.

Kebijakan-kebijakan yang ada sampai saat ini seringkali tidak seimbang untuk menjawab kedua permasalahan di atas. Kebijakan itu lebih condong pada upaya peningkatan kuantitas dan bukan kualitas. Misalnya, kebijakan pengadaan guru pada proyek Inpres SD/MI pada tahun 70-an, Wajar 6 Tahun pada tahun 80-an, dan guru bantu yang pada tahun-tahun belakangan ini diluncurkan lebih menilik pemenuhan kuantitas daripada pemenuhan kualitas.

Dari tahun ke tahun, kekurangan guru selalu saja menjadi masalah klasik dalam pendidikan di Indonesia.

Dengan alasan keterbatasan anggaran, pemerintah mengatasi masalah tersebut dengan mengangkat guru bantu. Kebijakan ini hanya bersifat tambal sulam. Depdiknas mencatat kekurangan guru di Indonesia mencapai 427.903 orang. Ini berarti, pengangkatan 190.714 tenaga guru bantu tadi masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan, dan kekurangannya masih lebih dari 50 persen.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Surya pada tahun 2004, menyebut angka dalam versi lain, namun substansi persoalannya tidak berbeda. Tanpa mengurai berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan, Surya mengungkapkan total guru yang tersedia hanya 2,2 juta orang, sementara yang dibutuhkan adalah dua kali lipat dari jumlah itu. Disamping itu setiap tahun tercatat sekitar 2.000 guru yang memasuki masa pensiun. Apabila kekurangan guru ini tidak ditangani serius, maka target program penuntasan program wajib belajar sembilan tahun yang akan menysar 4-5 juta anak usia sekolah (SD-SLTP)— dengan target tuntas tahun 2008 bisa jadi terbengkalai.

Permasalahan lain berkenaan dengan guru adalah penyebaran guru tidak merata. Di daerah-daerah ada yang kekurangan guru, secara nasional mencapai 156.454 orang sedangkan ada daerah lain yang kelebihan guru sebanyak 12.917 orang (BKN, 1997). Begitu juga jika dilihat dari tingkat pendidikan guru, masih terdapat sejumlah guru SD yang memiliki kualifikasi ijazah yang kurang sesuai dengan persyaratan untuk mengajar di SD/MI (Fasli Jalal, 2001).

Dalam dimensi pendidikan, banyak variabel yang memberi pengaruh terhadap pencapaian mutu pendidikan. Beberapa variabel tersebut antara lain: guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta manajemen yang digunakan. Dalam kaitannya dengan mutu, studi yang dilakukan The World Bank (1995, 1998) menyebutkan ada 8 faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan dasar (persekolahan) di Indonesia, yaitu; manajemen sekolah, struktur insentif, kualifikasi guru, waktu belajar, keuangan sekolah, ketersediaan buku dan bahan ajar, sistem monitoring dan evaluasi, dan sistem manajemen lembaga.

Di samping faktor ketersediaan guru yang masih kurang, faktor kualitas guru juga menjadi persoalan penting, karena

kualifikasi guru sangat mempengaruhi interaksi dan komunikasi pembelajaran di kelas yang lebih kondusif. Dengan demikian model komunikasi pembelajaran yang kondusif akan mempengaruhi derajat pencapaian hasil belajar peserta didik.

Dalam kaitannya dengan reformasi pendidikan dan desentralisasi di bidang pendidikan, telaah yang dilakukan Bank Dunia menyebutkan bahwa sistem pengelolaan guru merupakan faktor yang cukup penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Disebutkan bahwa sistem pengelolaan guru dalam era desentralisasi sangat penting, dengan alasan dua hal : pertama, guru merupakan barisan terdepan dalam interaksi pembelajaran di kelas, dan kedua, dana untuk upah ataupun gaji guru merupakan dana yang cukup besar dan menguras anggaran APBD yang cukup besar pula.

Sistem pengelolaan guru, termasuk sistem rekrutmen guru dalam era otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, World Bank menyarankan tiga pihak terkait, yaitu pemerintah (pusat dan daerah), sekolah (selaku penyelenggara pendidikan), dan klien (siswa, orang tua dan masyarakat), secara bersama-sama mengidentifikasi dan membuat

standar peningkatan sekolah dengan melakukan pengelolaan terhadap guru secara baik.

Bila diamati secara saksama, persoalan yang dihadapi pemerintah sekarang sebetulnya bukan saja bagaimana memenuhi angka-angka kebutuhan guru, melainkan juga kualitas guru. Dengan demikian persoalan mutu tenaga kependidikan tentu juga hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Dalam era otonomi daerah yang telah berlangsung sejak tahun 2001, pemenuhan angka kebutuhan dan mutu guru semakin jauh panggang dari api. Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan pengangkatan guru ke daerah kabupaten/kota. Namun, tidak semua pemerintah kabupaten/kota mampu menyediakan anggaran memadai untuk menggaji guru. Dari 341 kabupaten/kota di Indonesia, diperkirakan tidak sampai sepuluh persen di antaranya yang mampu menyediakan anggaran untuk pengangkatan guru.

Dalam hal pembinaan karier, pola kebijakan seperti itu juga merupakan batu sandungan bagi guru yang berprestasi. Seorang guru tidak lagi dengan mudah berpindah tugas antar daerah meskipun yang bersangkutan layak

dipromosikan. Guru yang sudah terlanjur berdinamika di daerah terpencil tidak mudah dimutasi ke wilayah perkotaan, terlebih jika skalanya sudah lintas provinsi.

Permasalahan pengadaan guru dan pengembangannya ini menjadi semakin berat bila dikaitkan dengan adanya *zero growth policy* untuk pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu implementasi pelaksanaan desentralisasi juga ternyata tidak berpihak pada permasalahan ini, karena pengadaan guru dinilai oleh pemerintah daerah sebagai beban daerah dan bukan sebagai peluang untuk peningkatan mutu dan pembangunan pendidikan.

Pengkajian sementara terhadap data yang ada, memperkirakan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 akan terjadi apa yang dinamakan dengan *booming* pensiun guru pada jenjang Sekolah Dasar. Hal ini dikarenakan guru-guru yang diangkat pada tahun 70-an melalui Inpres SD dan pada tahun 80-an melalui Wajar 6 Tahun akan mengalami masa pensiun. Prediksi ini memerlukan kajian yang mendalam untuk mempersiapkan pengadaan guru SD pengganti yang sekaligus dapat merupakan upaya untuk meningkatkan

mutu guru, yang dampaknya diharapkan pada peningkatan kualitas pendidikan secara umum.

Perumusan masalah

Pensiun guru SD secara masal akibat adanya kebijakan rekrutmen guru selama pelaksanaan Inpres dan Wajib Belajar 6 Tahun tidak dapat dihindari. Kondisi ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni: sebagai suatu permasalahan yang harus dicari alternatif pemecahannya dan sebagai peluang untuk memperbaiki kualitas guru SD yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan yang selama ini dirasakan belum memadai.

Pensiun guru SD yang masal akan mengakibatkan adanya kekosongan guru SD di beberapa daerah. Kekosongan ini bervariasi antar kabupaten/kota. Hal ini dapat dimaklumi karena rekrutmen guru selama pelaksanaan Inpres.

Berdasarkan kondisi di atas, diperlukan suatu studi yang diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan penelitian di bawah ini. Fokus kajian yang perlu dilakukan dalam kegiatan analisis kebutuhan ini, yaitu:

Berapa jumlah guru SD yang (diperkirakan) akan memasuki

usia pensiun pada tahun 2004 sampai dengan 2013 dengan asumsi usia pensiun 60 tahun?

1. Bagaimanakah kualifikasi guru SD yang saat ini ada sebagai bagian dari hasil perekrutan guru SD selama periode pengangkatan guru pada repelita I, II, dan III atau yang direkrut selama Inpres SD dan Wajib Dikdas 6 Tahun?
2. Bagaimanakah gambaran umum, khususnya sebaran dan perbedaan jumlah guru yang akan pensiun berdasarkan kabupaten/kota?
3. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menanggulangi dan mengisi kekosongan posisi guru sebagai akibat adanya waktu pensiun guru yang serentak, ditinjau dari kemampuan LPTK pemasok guru dan upaya Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota?
4. Bagaimanakah respon pemerintah daerah terhadap kebutuhan guru akibat dampak pensiun masal dan bagaimana pula pemerintah daerah menyikapi adanya variasi kondisi guru di sekolah?
5. Berapa guru pengganti yang dibutuhkan dalam rentang waktu 2004-2013,

untuk mengantisipasi dampak pensiun guru SD pada tahun 2004 sampai 2013?

Tujuan

Tujuan studi ini adalah untuk memperoleh data tentang kondisi guru saat ini dilihat dari kuantitas dan kualitas (tingkat pendidikan) sebagai dasar untuk menyusun rencana strategik tentang kebijakan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Hasil analisis meliputi kebutuhan guru dan kualifikasi yang dibutuhkan sebagai upaya untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta mengantisipasi dampak pensiun guru yang direkrut selama pelaksanaan Inpres SD dan Wajar 6 Tahun dan kaitannya dengan pelaksanaan *zero growth policy* untuk pengadaan/ rekrutmen PNS baru.

Secara khusus studi ini diarahkan

1. Untuk mengetahui berapa jumlah guru SD yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2004 sampai dengan 2013 dan sebarannya berdasarkan kabupaten kota.
2. Untuk mengetahui proyeksi kebutuhan guru di setiap kab/Kota di Jawa

Barat mulai tahun 2004 sampai 2013 berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah, jumlah guru yang ada dan jumlah guru yang akan pensiun pada tahun tersebut.

II. Metodologi Penelitian

Data Yang Diperlukan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini diperlukan sejumlah data yang diperoleh dari beberapa sumber. Data yang dimaksud adalah (1) jumlah guru SD yang akan pensiun selama kurun waktu tahun 2004-2013, (2) kualifikasi guru SD di Indonesia sampai tahun 2003, (3) kemampuan LPTK dalam menghasilkan calon guru SD, (4) respon pemerintah daerah terhadap kebutuhan guru, (5) penduduk usia 7-12 tahun, (6) penduduk usia 6-7 tahun, (7) angka penyerapan (AP) usia 6-7 tahun yang menjadi siswa baru, (8) angka lulusan, (9) angka putus sekolah, (10) jumlah siswa, (11) jumlah sekolah, (12) jumlah rombongan belajar dan (13) jumlah guru ideal.

Lokasi dan Subyek Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka lokasi penelitian yang

digunakan sebagai sumber data adalah Dinas Pendidikan Kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dua teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan wawancara dengan sumber data terkait.

1. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk menjangkau data utama yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu jumlah guru SD yang ada pada saat ini dan jumlah guru SD yang akan pensiun mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Data ini secara nasional berpusat di BKN yang telah dihimpun melalui Pendataan Ulang Pegawai negeri Sipil (PUPNS) tahun 2003. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- (1). Jumlah guru SD yang ada
 - (2). Kualifikasi pendidikan guru SD
 - (3). Jumlah guru yang akan pensiun mulai tahun 2004 sampai 2013.
- #### **2. Teknik Wawancara**
- Wawancara dilakukan untuk mengungkap respon-

respon pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan guru yang ada di daerahnya. Selain itu juga diajukan pertanyaan berkenaan dengan beberapa data yang diperoleh dari BKN yang menyajikan data dari propinsi. Hasil wawancara dijadikan masukan dalam membahas hasil penelitian dan rekomendasi yang diajukan.

Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu (1) melakukan triangulasi untuk data yang diperoleh dari BKN melalui data yang diperoleh dari propinsi, (2) melakukan analisis rasional terhadap hasil wawancara yang diperoleh dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan propinsi, (3) teknik proyeksi untuk setiap data yang diperlukan dalam memproyeksi kebutuhan guru. Untuk setiap teknik analisis yang dilakukan, disajikan dalam uraian berikut.

1. *Proyeksi Kebutuhan Guru (KG) yang diperlukan pada setiap tahun mulai tahun 2004-2013.*

Kebutuhan Guru (KG) adalah jumlah guru yang dibutuhkan setiap

tahunnya untuk menutupi kekurangan guru. Kebutuhan Guru (KG) dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta G_n = G_{i,n} - (G_{A,n} - G_{P,n})$$

Ket:

ΔG_n = Guru yang dibutuhkan pada tahun n

G_{in} = Guru Ideal pada tahun n

G_{pn} = Guru yang pensiun pada tahun n

G_{An} = Guru yang ada pada tahun n

2. **Jumlah Guru Ideal yang diperlukan pada setiap tahun mulai tahun 2004-2013.**

Jumlah Guru Ideal (GI) adalah jumlah guru yang dianggap sesuai dengan jumlah siswa.

Jumlah Guru Ideal (GI) dirumuskan sebagai berikut:

$$G_{in} = \sum R_n + (\sum S_n * 3)$$

Ket:

G_{in} = Guru Ideal pada tahun n

$\sum R_n$ = Jumlah Rombongan Belajar pada tahun n

$\sum S_n$ = Jumlah Sekolah pada tahun n

3 = Konsanta yang berarti setiap sekolah harus memiliki 3 guru lainnya, selain guru kelas, yaitu; uru Penjas, Guru Agama, dan Kepala Sekolah).

3. **Proyeksi Guru yang Ada selama 2004-2013**

Data dasar yang dijadikan rujukan untuk membuat proyeksi tentang guru yang ada didasarkan pada data Statistik Persekolahan SD dari Tahun 1999/2000 sampai dengan Tahun 2003/2004 yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas. Untuk menentukan jumlah guru diproyeksikan ada pada tahun-tahun berikutnya digunakan rumus:

$$G_n = G_{n-1} - G_{p,n-1}$$

Ket:

G_n = Guru yang ada pada tahun n

G_{n-1} = Guru yang ada pada tahun sebelumnya (n-1)

G_{Pn-1} = Guru Pensiun pada tahun sebelumnya (n-1)

4. Jumlah Guru yang akan Pensiun selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2013

Untuk mengetahui jumlah guru SD yang akan pensiun dalam kurun waktu tahun 2005-2014, dipergunakan asumsi bahwa "Pensiunnya Guru SD dimulai pada usia 60 tahun, dengan golongan tertinggi adalah golongan IIIId/IVa". Dari asumsi tersebut dimunculkan formula untuk mengetahui jumlah guru SD yang akan pensiun dalam rentang waktu 2005-2014, yaitu:

$$T_p = T_L + 60$$

Keterangan:

T_p = Tahun pensiun

T_L = Tahun lahir

60 = Konstanta untuk usia masa pensiun

5. Proyeksi Jumlah Rombongan Belajar (ΣRB) yang diperlukan pada setiap tahun mulai tahun 2004-2013.

Jumlah Rombongan Belajar (ΣRB) adalah banyaknya Rombongan Belajar yang diperlukan pada setiap tahunnya, mulai tahun 2004-2013. Untuk mengetahui Jumlah Rombongan Belajar (ΣRB) yang diperlukan, terlebih dahulu harus diketahui rasio siswa per rombongan belajar pada tahun-tahun sebelumnya (dalam studi ini diketahui rasio siswa per rombongan belajar selama 4 tahun mulai tahun 2000 sampai 2003). Rasio Siswa per rombongan belajar dihitung dengan cara:

$$RRB_n = \frac{\Sigma S_n}{\Sigma RB_n}$$

Ket:

RRB_n = Rasio Siswa per rombongan belajar pada tahun n

ΣS_n = Jumlah siswa pada tahun n

ΣRB_n = Jumlah rombongan belajar pada tahun n

$$\Sigma RB_n = \frac{\Sigma S_n}{RRB_n}$$

6. Proyeksi Jumlah Sekolah (Σ Sek) yang diperlukan pada setiap tahun mulai tahun 2004-2013.

Jumlah Sekolah (Σ Sek) adalah banyaknya sekolah yang diperlukan pada setiap tahunnya, mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Untuk mengetahui Jumlah Sekolah yang diperlukan, terlebih dahulu harus diketahui rasio siswa per sekolah pada tahun-tahun sebelumnya (dalam studi ini diketahui rasio siswa per sekolah selama 4 tahun mulai tahun 2000 sampai 2003). Rasio Siswa per Sekolah dihitung dengan cara:

$$RSek_n = \frac{\Sigma S_n}{\Sigma Sek_n}$$

Ket:

$RSek_n$ = Rasio Siswa per sekolah pada tahun n

ΣS_n = Jumlah siswa pada tahun n

ΣSek_n = Jumlah sekolah pada tahun n

7. Proyeksi Jumlah Siswa pada setiap tahun mulai tahun 2004-2013.

Jumlah Siswa (ΣS) adalah seluruh siswa yang diproyeksikan mengikuti pendidikan (sekolah) pada setiap tahunnya. Untuk menghitung jumlah Siswa diperlukan data tentang jumlah siswa baru kelas I pada tahun n, jumlah lulusan pada tahun n dan jumlah siswa putus sekolah pada tahun n yang kemudian dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\Sigma S_n = \Sigma S_{n-1} + \Sigma SB-I_n - (\Sigma L_n + \Sigma PS_n)$$

Ket:

ΣS_n = Jumlah siswa pada tahun n

ΣS_{n-1} = Jumlah siswa pada tahun sebelumnya (n-1)

$\Sigma SB-I_n$ = Jumlah Siswa Baru kelas I pada tahun n

ΣL_n = Jumlah Lulusan pada tahun n

ΣPS_n = Jumlah Siswa Putus Sekolah pada tahun n

8. **Proyeksi Jumlah siswa baru (Kelas I) pada setiap tahun mulai tahun 2004-2013.**

Angka penyerapan adalah proporsi anak usia 6-7 tahun yang menjadi siswa baru pada setiap tahun. Angka Penyerapan dinyatakan dalam bentuk proporsi (persentase). Angka penyerapan dirumuskan sebagai:

$$AP_n = \frac{\sum SB - I_n}{P_{6-7 \text{ tahun } n}}$$

Ket:

AP_n = Angka Penyerapan anak usia 6-7 tahun pada tahun n

$\sum SB - I_n$ = Jumlah siswa baru pada tahun n

$P_{6-7 \text{ tahun } n}$ = Penduduk usia 6-7 tahun pada tahun n

$$SB - I_n = AP_n \times P_{6-7 \text{ th } n}$$

9. **Proyeksi Penduduk Usia 6-7 th dari tahun 2004 - 2013.**

Data penduduk usia 6-7 tahun diperlukan untuk mengetahui kecenderungan perkembangan anak yang akan masuk ke kelas satu mulai tahun 2004-2013.

Data penduduk usia 6-7 tahun telah diproyeksikan oleh BPS bekerja sama dengan Balitbang Depdiknas mulai tahun 2004 sampai 2010. Data tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar perhitungan penduduk untuk memproyeksi usia 6 - 7 tahun untuk tahun 2011-2013. Rumus yang digunakan sama dengan rumus proyeksi penduduk usia 7-12 tahun, yaitu menggunakan *Exponential Growth*, sebagai berikut:

$$P_n = P_o e^{rt}$$

Oleh karena rumus di atas dimaksudkan untuk mencari harga pertumbuhan penduduk, selanjutnya rumus tersebut dapat dikembangkan menjadi:

$$e^{rt} = \frac{P_n}{P_o}$$

$$\ln e^{rt} = \ln \left(\frac{P_n}{P_o} \right)$$

$$r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{P_n}{P_o} \right)$$

Ket:

P_n = Penduduk usia 6-7 tahun pada tahun n (tahun data akhir yang ada)

- P_0 = Penduduk usia 6-7 tahun pada tahun n (tahun data awal yang ada)
- e = Angka eksponensial (2,7182818)
- r = Angka pertumbuhan (angka yang dicari sebagai proyeksi)
- t = rentang tahun dari tahun awal proyeksi dengan tahun akhir proyeksi

Setelah harga r diketahui, selanjutnya harga tersebut disubstitusikan ke rumus awal untuk memproyeksi penduduk usia 6-7 tahun pada tahun 2011 sampai dengan 2013.

10. *Proyeksi Angka Lulusan pada setiap tahun mulai tahun 2004 sampai dengan 2013.*

Angka Lulusan adalah proporsi siswa yang lulus dari setiap tahun dibandingkan dengan jumlah siswa pada tahun tersebut. Angka Lulusan dinyatakan dalam bentuk proporsi (persentase). Angka Lulusan dirumuskan sebagai:

$$AL_n = \frac{\sum L_n}{\sum S_n}$$

Ket:

AL_n =Angka Lulusan pada tahun n

$\sum L_n$ =Jumlah Lulusan pada tahun n

$\sum S_n$ =Jumlah Siswa SD pada tahun n

11. *Proyeksi Angka Putus Sekolah (APS) pada setiap tahun mulai tahun 2004 - 2013.*

Angka Putus Sekolah (APS) adalah proporsi siswa yang putus sekolah dari setiap tahun dibandingkan dengan jumlah siswa pada tahun tersebut. Angka Putus Sekolah (APS) dinyatakan dalam bentuk proporsi (persentase). Angka Putus Sekolah (APS) diformulasikan sebagai berikut:

$$APS_n = \frac{\sum PS_n}{\sum S_n}$$

Ket:

APS_n =Angka Putus Sekola pada tahun n

$\sum PS_n$ =Jumlah siswa putus sekolah pada tahun n

$\sum S_n$ =Jumlah Siswa SD pada tahun n

III. Hasil Penelitian

1. Jumlah Guru SD yang akan Pensiun

Berdasarkan data BKN yang dihimpun melalui kegiatan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) tahun 2003, jumlah guru sekolah dasar di Indonesia sebanyak 1.036.414 orang, yang terdiri atas 566.375 orang perempuan dan 470.039 orang laki-laki. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat yang tersebar di 25 Kab/Kota sebanyak 134.635 atau ada sekira 13 % dari populasi yang akan pensiun. Dan untuk Kota Bandung mencapai jumlah akan pensiun yang terbesar yaitu sebanyak 15353 atau 11 % dari seluruh Kab/Kota di Jawa Barat. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1
Sebaran Guru PNS SD akan Pensiun di Provinsi Jawa Barat

Kab/Kota	Jumlah Guru PNS SD akan Pensiun									
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025	2030	2035
1.BOGOR	46	20	83	101	98	142	191	178	238	274
2.SUKABUMI	45	63	48	72	87	121	182	197	292	238
3.MALANG	41	58	48	87	127	174	214	288	304	317
4.SEMARANG	78	128	81	128	181	271	388	347	442	428
5.BALUR	81	81	102	112	118	187	174	224	241	287
6.TANJUNGPINRANG	75	88	80	120	141	182	188	187	282	274
7.CAMDE	88	72	87	111	128	208	222	272	288	354
8.SUKARAJA	88	58	81	79	77	82	117	118	124	124
9.PURBANDA	28	32	28	47	47	70	137	138	148	168
10.MALANGKOTA	41	43	52	62	81	113	112	118	152	158
11.SURABAYA	29	21	27	82	85	88	108	128	201	182
12.BANJARNEGARA	18	28	28	28	85	83	108	128	148	178
13.SURABAYA	8	12	12	22	104	111	118	152	162	182
14.PURWAKARTA	14	22	22	22	22	31	38	48	77	80
15.KARANGANYAR	21	48	41	31	72	128	182	101	182	128
16.BANDUNG	17	22	24	21	28	88	88	87	88	272
17.KOTA BOGOR	17	24	11	24	42	28	88	101	88	102
18.KOTA SUKABUMI	7	7	12	12	11	17	22	21	37	45
19.KOTA BANDUNG	182	81	101	122	144	178	218	207	272	282
20.KOTA CIREBON	15	18	11	28	18	17	22	22	22	22
21.KOTA BEKASI	8	12	12	22	12	42	88	87	82	182
22.KOTA DEPOK	28	28	31	30	48	54	57	58	118	117
23.KOTA CIMATI	15	12	12	24	22	44	28	62	47	47
24.KOTA PASIRKUNYATA	12	14	18	17	27	40	45	41	88	88
25.KOTA BANAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah	888	1112	1122	1544	1888	2482	2872	3248	4488	4782

Sumber : BKN, 2003

2. Kualifikasi Guru SD

Guru SD yang ada saat ini di Jawa Barat, sebagian besar berpendidikan D2, yaitu: sebanyak 16609 orang atau sekitar 71,84%, sedangkan jumlah paling sedikit adalah lulusan S3, yaitu sebanyak 3 orang atau sekitar 0.001%. Hal yang menarik adalah masih ada guru SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SD, yaitu sebanyak 59 orang atau sekitar 0,04%.

Memperhatikan kondisi pendidikan guru tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu guru melalui peningkatan pendidikan bagi mereka yang belum pensiun dan mempersiapkan guru pengganti dengan kualifikasi pendidikan minimal D2 PGSD sesuai dengan persyaratan minimal yang diatur dalam Keppmendiknas Nomor 0854/O/1989 tanggal 30 Desember 1989. Secara rinci data tentang kualifikasi guru SD berdasarkan latar belakang pendidikan ada pada tabel 2

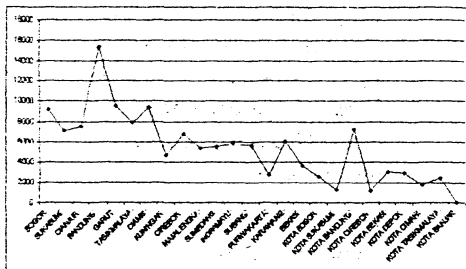
Tabel 2
Kualifikasi Pendidikan Guru SD di
Jabar

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	59
SMP	176
SMA	16,609
D1	220
D2	96,718
D3	2,294
D4	5
S1	18,438
S2	113
S3	3
Total	134,635

Sumber: BKN, 2003

3. Sebaran dan Perbedaan Jumlah Guru SD yang Memasuki Pensiun

Sebaran dan perbedaan jumlah guru yang akan pensiun per Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagaimana tertera dalam tabel 1 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Sebaran Pensiun Guru SD di
Jawa Barat

4. Kemampuan LPTK dalam Menghasilkan Guru

LPTK yang menyelenggarakan pendidikan untuk guru SD (D2) berdasarkan SK Dirjen sebanyak 49 LPTK, sedangkan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program S1 PGSD sebanyak 7 LPTK, yaitu: Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Surakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas Terbuka, dan Universitas Atmajaya. Secara rinci lembaga penyelenggara D2 PGSD dan S1 PGSD dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3

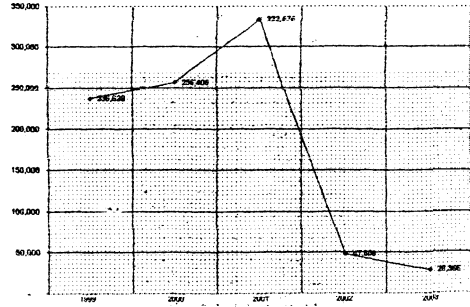
Jumlah LPTK Program D2 PGSD

LPTK	SK CPNS
1 Univ. Negeri Jabarta	400b/DKTKesp/1992
2 Univ. Pendi. Indonesia	400b/DKTKesp/1993
3 Univ. Negeri Semarang	400b/DKTKesp/1994
4 Univ. Negeri Yogyakarta	400b/DKTKesp/1995
6 Univ. Negeri Surabaya	400b/DKTKesp/1996
7 Univ. Negeri Malang	400b/DKTKesp/1997
7 Univ. Negeri Meulan	400b/DKTKesp/1998
8 Univ. Negeri Padang	400b/DKTKesp/1999
9 Univ. Negeri Manado	400b/DKTKesp/2000
10 Univ. Negeri Makassar	400b/DKTKesp/2001
11 Univ. Negeri Singaraja	400b/DKTKesp/2002
12 IKIP Negeri Gorontalo	400b/DKTKesp/2003
13 Univ. Terbuak	400b/DKTKesp/2004
14 Univ. Sebelas Maret	400b/DKTKesp/2005
15 Univ. Jember	400b/DKTKesp/2006
16 Univ. Syiah Kuala	400b/DKTKesp/2007
17 Univ. Riau	400b/DKTKesp/2008
18 Univ. Jambi	400b/DKTKesp/2009
19 Univ. Sriwijaya	400b/DKTKesp/2010
20 Univ. Lampung	400b/DKTKesp/2011
21 Univ. Bengkulu	400b/DKTKesp/2012
22 Univ. Tanjungpura	400b/DKTKesp/2013
23 Univ. Palangkaraya	400b/DKTKesp/2014
24 Univ. Lambung Mangkurat	400b/DKTKesp/2015
25 Univ. Negeri Semarang	400b/DKTKesp/2016
26 Univ. Mataram	400b/DKTKesp/2017
27 Univ. Nusantara	400b/DKTKesp/2018
28 Univ. Tadulako	400b/DKTKesp/2019
29 Univ. Maluku	400b/DKTKesp/2020
30 Univ. Pattimura	400b/DKTKesp/2021
31 Univ. Cendrawasih	400b/DKTKesp/2022
32 Univ. MuH Prof. Hamka	400b/DKTKesp/2023
33 Univ. Sains Walailak	400b/DKTKesp/2024
34 Univ. Kungkulan	400b/DKTKesp/2025
35 Univ. IKIP Negeri Negeri	400b/DKTKesp/2026
36 Univ. Khairun Terate	211/DKTKesp/2000
37 Univ. NAB, Makassar	250/DKTKesp/2001
38 Univ. Flores	260/DKTKesp/2001
39 ST Fils. Semmeri Pinetang	2613/DKTKesp/2001
40 Univ. MuH, Blora	811/DKTKesp/2001
41 Alim Korpriun "PAES BARAN"	650/DKTKesp/2001
42 STKIP St. Paulus Bulang	1293/DKTKesp/2003
43 Univ. MuH, Palangkaraya	1602/DKTKesp/2002
44 STKIP Gotong Royong Maluku T	2698/DKTKesp/2003
46 Univ. Serambi Meulih NAD	3000/DKTKesp/2003
46 STKIP Sains Bangsa NAD	1398/DKTKesp/2003
47 STKIP Kie Raha, NAD	1487/DKTKesp/2003
48 IKIP NCTI Cemerlang	6000/DKTKesp/2004
49 Univ. Sarana Dharma	2641/DKTKesp/2004

Sumber : Dikti

Berdasarkan data (gambar 2) diperoleh bahwa jumlah lulusan D2 PGSD untuk tahun 1999 berjumlah 236.638 orang, pada tahun 2000 sebanyak 256.406 orang, pada tahun 2001 berjumlah 333.676 orang dan menurun tajam pada tahun 2002 sebanyak 47.808 orang dan pada tahun 2003 sebanyak 28.366 orang lulusan.

Lulusan D2 LPTK



Gambar 2

Lulusan D2 PGSD

5. Respons Terhadap Daerah Kebutuhan Guru

Dari hasil studi yang dilakukan disalah satu propinsi sampel, diperoleh informasi bahwa Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan untuk mengatasi kekurangan guru melalui program rekrutmen guru bantu sementara (GBS) yang dibiayai APBD, *re-grouping* (menyatukan sekolah-sekolah yang letaknya berdekatan), dan *Multi-Grade Teaching* (di daerah terpencil).

Di Kota Bandung, guru yang akan pensiun sampai tahun 2015 mencapai 7.259 orang dengan jumlah per tahun rata-rata di atas 100 orang. Angka ini dijadikan dasar dalam

kuota rekrutmen guru untuk satu kabupaten yang membutuhkan guru. Untuk mengatasi pensiun guru ini, pemerintah daerah menetapkan jumlah formasi yang akan menjadi PNS baru dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah, kemudian mengajukan program tambahan guru melalui dana APBD.

6. Prediksi Kebutuhan Guru

Berdasarkan analisis terhadap variabel-variabel yang diprediksi mempengaruhi kebutuhan guru, di antaranya; penduduk usia 7-12 tahun, siswa SD, rombongan belajar, dan guru yang ada serta guru yang pensiun, diprediksi bahwa provinsi Jawa Barat akan mengalami peningkatan kebutuhan guru SD

Dari hasil analisis diperoleh bahwa proyeksi penduduk usia 7-12 tahun selama tahun 2004 sampai dengan 2013 mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan proyeksi penurunan jumlah siswa SD dan jumlah rombongan belajar. Proyeksi

penurunan ketiga variabel ini tentunya juga mempengaruhi proyeksi kebutuhan guru ideal yang memang diprediksi menurun. Tetapi proyeksi tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan proyeksi kebutuhan guru secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena dua hal: pertama, adanya gap antara guru yang ada dengan guru ideal yang seharusnya ada (perbandingan 1 sekolah 9 guru) dan kedua, berkenaan dengan jumlah guru pensiun yang meningkat dari tahun ke tahun

Kesenjangan antara jumlah guru yang ada dan jumlah guru yang seharusnya ada (guru ideal) dari tahun ke tahun akan semakin besar bila tidak ada penambahan jumlah guru di luar penggantian untuk jumlah guru yang pensiun (sebagaimana diperlihatkan pada gambar 4.5). Sebagai contoh jumlah guru SD, baik yang PNS maupun yang non PNS, pada tahun 2005 berjumlah 165255 orang sedangkan jumlah guru ideal adalah 213111. Jadi, terdapat kesenjangan sebesar 47856 orang (22%).

Jumlah guru yang pensiun juga turut mempengaruhi proyeksi kebutuhan guru. Pada tahun 2005 misalnya, jumlah guru PNS yang pensiun sebanyak 1115 atau 0.01% dari jumlah guru SD yang berstatus PNS. Kondisi ini dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan, khususnya mulai tahun 2005 dan puncaknya berada pada tahun 2012.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
 Proyeksi Kebutuhan Guru SD
 Tahun 2000 - 20013

TAHUN	2000	2001	2002	2003	2004	2006	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
P12	4.343.000	4.340.700	4.336.200	4.329.000	4.320.900	4.310.100	4.303.500	4.293.900	4.281.300	4.265.900	4.247.400	4.226.200	4.225.100	4.214.000
P67	1.449.700	1.447.000	1.444.000	1.440.700	1.435.700	1.429.500	1.427.300	1.424.300	1.420.700	1.416.300	1.411.100	1.406.475	1.405.054	1.403.239
B SwSD	182	210	213	214	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
B SwKS	24	30	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Siswa Baru TK I	932.758	771.361	771.367	774.239	806.681	863.196	861.962	866.276	799.253	795.701	792.658	791.304	789.912	789.442
Akumulasi	761.602	625.850	629.121	628.510	662.512	668.187	672.192	675.371	677.737	679.300	680.361	680.777	680.805	680.647
Pada Sekolah	30.964	94.238	163.787	138.624	107.192	108.097	108.758	109.272	109.655	109.921	110.079	110.139	110.151	110.126
Murid Siswa	4.342.479	4.303.752	4.372.211	4.378.316	4.415.294	4.442.287	4.463.299	4.478.932	4.468.793	4.436.273	4.408.682	4.409.211	4.406.166	4.405.835
Amah Sekolah	23.820	20.911	20.486	20.475	21.546	21.678	21.781	21.857	21.910	21.942	21.953	21.956	21.951	21.959
Amah Rombel	179.314	145.671	150.159	152.880	147.176	148.076	148.777	149.290	149.660	149.876	149.956	149.974	149.939	149.861
Guru Ideal	250.774	208.404	211.617	214.205	211.816	213.111	214.119	214.868	215.390	215.700	215.816	215.841	215.791	215.679
Guru yang Ada	175.989	167.949	153.124	165.054	166.370	165.255	164.130	162.616	160.717	158.224	155.332	152.114	147.666	143.480
Guru Pensiun					893	1.115	1.125	1.514	1.899	2.493	2.882	3.218	4.448	4.206
Kelebihan Guru					44.663	46.741	48.264	60.739	62.774	64.993	67.682	68.689	63.977	69.813

Sumber : Hasil Analisis Data

IV. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Guru Pensiun dan Guru Pengganti

Secara kuantitas melalui memperbandingkan secara sepintas antara jumlah sekolah dan jumlah guru yang ada di Jawa Barat dapat dikatakan bahwa Jawa Barat masih kekurangan guru untuk SD. Dengan asumsi 1 sekolah membutuhkan 9 guru (6 guru kelas, 1 guru agama, dan 1 guru pendidikan jasmani ditambah 1 orang kepala sekolah), maka kebutuhan guru di Jawa Barat dengan jumlah guru SD yang ada saat ini sebanyak 165.255 (data BKN tahun 2005), maka kekurangan guru pada tahun 2005 sebanyak 46.741 orang. Namun demikian perlu dipahami bahwa penghitungan kebutuhan guru tidak semata-mata dipengaruhi oleh jumlah sekolah, tetapi dipengaruhi variabel-variabel lain seperti jumlah rombongan belajar, jumlah siswa, jumlah guru yang pensiun, dan jumlah guru yang ada saat itu.

Dengan memperhatikan sebarannya di setiap provinsi, guru SD yang ada di Jawa Barat memang jumlahnya tidak merata, namun bila dilihat dari

proporsinya termasuk proporsional. Sebagai contoh, jumlah guru yang ada di Jawa Barat 134.635 orang atau 13 % dari seluruh guru yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat dikatakan proporsional karena jumlah sekolah yang ada pun sebanyak 20.475 unit atau 14% dengan jumlah siswa sebanyak 4.378.316 orang atau 17 % memang berada di Jawa Barat.

Perbedaan penyebaran ini tentunya akan mempengaruhi penyebaran kebutuhan guru yang juga tidak akan merata untuk setiap Kabupaten/Kota. Di satu sisi ada kabupaten/kota yang sangat kekurangan guru dan di sisi lain akan terdapat kabupaten/kota yang kelebihan guru. Sebagai contoh, pada tahun 2005, Guru yang akan pensiun di Kota Bandung sebanyak 129 orang, membutuhkan tambahan guru pengganti, sedangkan guru yang diseleksi dan akan diangkat sebanyak 116 orang (sumber: BKD Kota Bandung, 2004) jadi masih kekurangan guru sebanyak 13 orang.

2. Peningkatan Kualitas Guru

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa

efisiensi penyelenggaraan pendidikan dasar masih rendah. Hal ini terbukti dari aspek penyebaran guru SD/MI yang memperlihatkan bahwa di satu sisi ada daerah yang kekurangan guru dan di sisi lain ada daerah lain kelebihan guru. Begitu juga jika dilihat dari aspek kualifikasi pendidikan guru SD/MI, masih menunjukkan data bahwa terdapat guru yang memiliki kualifikasi ijazah yang kurang sesuai dengan persyaratan untuk mengajar di SD/MI (Fasli Jalal, 2001).

Dalam dimensi pendidikan, memang banyak faktor yang memberi pengaruh terhadap pencapaian mutu pendidikan. Beberapa variabel tersebut antara lain: faktor guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta manajemen yang dianut. Hal ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan *The World Bank* (1995) yang menyatakan bahwa terdapat 8 faktor yang sangat kritis menimpa program pendidikan dasar di Indonesia, yaitu; (1) manajemen sekolah, (2) struktur insentif, (3) kualifikasi/mutu guru, (4) waktu belajar, (5) keuangan sekolah, (6) ketersediaan buku teks dan bahan belajar, (7) sistem monitoring dan

evaluasi, dan (8) manajemen lembaga. Faktor kualifikasi guru serta ketersediaan buku teks, bagaimanapun akan sangat mempengaruhi interaksi dan komunikasi pembelajaran di kelas. Dengan demikian model komunikasi pembelajaran yang kondusif akan mempengaruhi derajat pencapaian hasil belajar peserta didik.

Lebih lanjut laporan Bank Dunia (1997) menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh lima faktor dominan, yaitu; (1) pengembangan dan implementasi kurikulum, (2) kualitas buku teks dan panduan/pedoman bagi guru, (3) sistem pengujian, (4) efektivitas pelatihan untuk meningkatkan mutu guru, dan (5) lingkungan kelas dan sekolah yang kondusif untuk terciptanya kegiatan pembelajaran.

Dalam kaitannya dengan reformasi pendidikan dan desentralisasi di bidang pendidikan, telaah yang dilakukan Bank Dunia menyebutkan betapapun fungsi reformasi pendidikan telah digulirkan dengan baik, pembagian kewenangan

ataupun desentralisasi pendidikan telah diaplikasikan sampai ke akar rumpun, sistem pengelolaan guru merupakan faktor yang cukup penting, dengan alasan dua hal: pertama, guru merupakan barisan terdepan dalam interaksi pembelajaran di kelas antara siswa dengan guru, dan kedua secara budgetif, dana untuk upah ataupun gaji guru merupakan dana yang cukup besar dan menguras anggaran APBD yang cukup besar pula

Dalam kaitannya dengan sistem pengelolaan guru, termasuk sistem rekrutmen guru dalam era otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, sepatutnya mempertimbangkan empat pihak terkait, yaitu pemerintah, termasuk di dalamnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak sekolah itu sendiri sebagai service providers, pihak LPTK sebagai pemasok guru dan pihak masyarakat termasuk di dalamnya orangtua murid. Hasil studi yang dilakukan oleh *World Bank*, (1997) mengungkapkan bahwa pengelolaan guru harus berdampak secara positif terhadap sekolah. Oleh karena itu agar sekolah memiliki kinerja yang baik, maka dibutuhkan guru yang

berkualitas sesuai dengan kebutuhan para pengguna, yaitu pemerintah, sekolah, siswa dan orang tua.

Selama sepuluh tahun terakhir, kualifikasi guru terus meningkat, baik karena pendidikan tambahan maupun karena persyaratan untuk penerimaan guru baru ditingkatkan. Misalnya, jika hingga akhir tahun 1980-an kualifikasi guru SD adalah pendidikan menengah (SPG, SGO, PGA), maka mulai tahun 1990-an ditingkatkan menjadi D-II.

3. Penyiapan Guru Pengganti

Setiap tahun LPTK memang menghasilkan sekitar 40 ribu lulusan yang umumnya S-1, sedangkan 49 LPTK penyelenggara PGSD D2 pada dua tahun terakhir ini rata-rata hanya menghasilkan 38.087 orang lulusan. Kemampuan LPTK yang terdaftar di Dikti ini tentunya masih jauh dibandingkan dengan kebutuhan untuk pemenuhan guru yang diharapkan. Gambar 4.7 memperlihatkan perbandingan antara proyeksi kebutuhan guru dan kemampuan LPTK

Melimpahnya lulusan LPTK dengan kualitas yang beragam menjadi alasan bagi Depdiknas sebenarnya untuk

mengembangkan model seleksi yang lebih ketat sehingga hanya lulusan LPTK yang benar-benar memenuhi persyaratan yang dijang. Lazimnya berlaku dalam mekanisme pasar, apabila pasokan melimpah, maka persyaratan mutu ditingkatkan. Dengan demikian, betapapun mutu lulusan LPTK merentang dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dengan sistem seleksi yang ketat yang disertai komitmen kita semua untuk melaksanakan hal tersebut, maka hanya mereka yang berada pada kedudukan persentile teratas yang akan terjaring.

Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan profesionalisme guru. Merekrut staf berkemampuan tinggi melalui seleksi yang mengutamakan kemampuan penguasaan calon dalam bidang keahliannya ternyata menimbulkan perubahan positif pada kinerja pegawai yang bersangkutan dan satuan kerjanya, sebagaimana hasil penelitian Nunberg (1995) dalam Dedi Supriadi (2001:25) mengungkapkan bahwa "pengangkatan pegawai baru yang bermutu tinggi dapat mengatasi sejumlah kelemahan

sistem; sebaliknya, akibat dari tiadanya kader-kader pegawai yang bermutu sangat sulit diatasi kemudian".

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 akan terjadi pensiun massal guru PNS SD di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Dari jumlah guru PNS yang ada saat ini. Banyaknya guru yang pensiun ini dapat dijadikan peluang bagi upaya peningkatan mutu pendidikan, yakni dengan memilih guru pengganti yang lebih kompeten dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dan bermutu.
2. Kualifikasi pendidikan guru SD di Jawa Barat masih perlu ditingkatkan, setidaknya minimal lulusan D2 PGSD. Saat ini guru SD yang kualifikasinya SMA/ sederajat ke bawah masih cukup banyak.
3. Jumlah guru SD yang pensiun beragam antara

satu daerah dengan daerah lainnya.

4. Untuk memenuhi kebutuhan guru SD, sebanyak 49 LPTK telah ditunjuk Dikti untuk menyelenggarakan program D2 PGSD dan 7 LPTK untuk program S1 PGSD. Dari jumlah lulusan yang telah dihasilkannya, dapat disimpulkan bahwa kemampuan LPTK untuk menghasilkan tenaga guru SD masih perlu ditingkatkan baik jumlah maupun mutu lulusan.

5. Respon pemerintah daerah dalam mengatasi kekurangan dan pemenuhan kebutuhan guru ternyata cukup bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

6. Diprediksi bahwa kebutuhan guru SD rata-rata lebih dari 100.000 orang setiap tahun diperlukan sebagai guru pengganti.

Beberapa rekomendasi yang diusulkan berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan adalah:

1. Permasalahan kekurangan guru merupakan masalah yang terjadi antar lintas departemen, sehingga data,

informasi, dan kebijakan yang ada dan dibutuhkan meliputi berbagai departemen dan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama di antara departemen atau lembaga terkait. Depdiknas, Depag, Depdagri, BKN, dan Pemerintah Daerah serta LPTK-LPTK merupakan departemen dan lembaga yang harus bersinergi untuk menangani permasalahan ini. Oleh sebab itu, untuk permasalahan kekurangan guru SD disarankan sebagai berikut: (a) Secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah, mulai tahun 2005 - 2009 merekrut tenaga guru baru melalui jalur pengangkatan PNS dengan sistem seleksi yang cukup ketat, transparan, dan akuntabel, sehingga diperoleh tenaga guru SD yang profesional dan bermutu; (b) Pemerintah Daerah bersama pihak legislatif, atas inisiatif lokal, melaksanakan perekrutan guru bantu sementara (GBS) untuk dipekerjakan di SD, dengan biaya APBD setempat; dan (c) Bagi para guru SD yang akan memasuki pensiun, bila berminat dan memenuhi persyaratan

tertentu, bisa saja dipekerjakan kembali dengan status "guru honor purna bakti". Sistem rekrutmen, penempatan kembali, dan ketentuan lainnya diatur oleh pemda setempat, termasuk alokasi pembiayaan dari APBD.

2. Kualitas guru perlu ditingkatkan. Dari data yang ada terungkap bahwa dari sisi kualifikasi pendidikan guru yang ada saat ini saja hampir setengahnya hanya berpendidikan SLTA, paling banyak diploma, dan hanya sedikit yang berlatarbelakang pendidikan sarjana apalagi pascasarjana. Calon guru yang diangkat itu harus berpendidikan, cerdas, dan lebih pintar dibandingkan dengan para siswanya. Peningkatan guru dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu: (a) pendidikan formal; (b) pelaksanaan *inservice training*; (c) pembinaan dan bantuan profesional (*professional support*), dan (d) forum guru melalui KKG. Untuk itu disarankan (a) Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk program penyetaraan guru SD/MI setara dengan Program D2

PGSD, dengan penyelenggara melibatkan LPTK setempat ataupun universitas lainnya yang memenuhi persyaratan untuk itu; (b) Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penyetaraan guru SD sebagai guru kelas. Program ini ditujukan untuk guru mata pelajaran olahraga dan guru agama di SD, agar memiliki kualifikasi menjadi guru kelas di SD. Program penyetaraan ini, melibatkan universitas/LPTK yang berkemampuan untuk itu; dan (c) Pembinaan profesional dan bantuan profesional oleh para pengawas TK/SD dan pengawas pergurais, lebih diintensifkan, tak hanya aspek administratif juga aspek akademik dan kemampuan mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang ada di SD; serta (d) Peningkatan dan pemanfaatan forum guru melalui forum guru di KKG.

3. Mengoptimalkan keadaan guru pada kondisi sekolah tertentu dapat dilakukan *merger* sekolah dan *multi-grade Teaching*. *Merger* sekolah tepat digunakan pada kondisi sekolah kompleks di perkotaan,

sedangkan *multi-grade Teaching* lebih tepat digunakan pada kondisi sekolah yang jumlah siswanya sedikit dengan jarak antar sekolah yang satu dengan lainnya relatif jauh. Untuk efektifitas dan kesinambungan pasca merger SD, disarankan remutasi guru ke daerah "terpencil" dengan sistem *reward* yang menarik, misalnya Pemda menganggarkan insentif yang menarik, yaitu bagi guru SD yang mau pindah ke lokasi SD terpencil. Untuk efektifitas *multi-grade teaching*, disarankan ada pelatihan guru dengan melibatkan LPTK setempat dan LPMP di daerah.

4. Untuk dapat melihat kemampuan LPTK dalam menghasilkan jumlah lulusan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan guru SD, perlu kajian untuk memetakan lulusan D2 PGSD yang dihasilkan oleh LPTK sesuai dengan SK Dirjen. Begitu juga angka penyerapan lulusan D2 PGSD perlu diketahui untuk melihat pemenuhan kebutuhan guru SD secara geografis sehingga dapat diketahui jangkauan lulusan terutama bagi

daerah yang belum memiliki LPTK yang menghasilkan D2 PGSD. Selain itu angka penyerapan dapat menjadi indikator kualitas lulusan sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi LPTK dalam menerima calon mahasiswa D2 PGSD.

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan guru memiliki kecenderungan bertambah untuk setiap tahun mulai tahun 2004 sampai dengan 2013, hal tersebut di sebabkan di antaranya kebutuhan guru yang belum sampai pada titik ideal dan bertambahnya jumlah guru SD yang akan pensiun. Oleh karena itu kebijakan "Zero Growth" tentang pengangkatan guru khususnya guru SD perlu dikaji kembali.

6. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru, studi tentang Standar kompetensi guru SD yang diakui oleh berbagai pihak (pemerintah, LPTK, PGRI dan masyarakat) dirasakan mendesak untuk segera diwujudkan sehingga dapat melihat melihat profile kinerja guru SD yang ada.

7. Profile kinerja guru SD dapat dijadikan database untuk keperluan penetapan peserta peningkatan kualifikasi guru SD melalui pelatihan atau jenjang pendidikan S.1, standar kompetensi guru SD dapat dijadikan acuan bagi LPTK penyelenggara PGSD dan menyiapkan model-model pelatihan yang sesuai dengan profile kinerja guru yang ada.
8. Untuk memenuhi kekurangan guru saat ini pada satu sisi supply

LPTK (D.2 PGSD) dalam setiap tahunnya relatif terbatas, tetapi pada sisi yang lain supply S.1 LPTK untuk bidang studi masih ada yang belum terserap menjadi guru, oleh karena itu untuk memenuhi kekurangan guru saat ini dapat dilakukan dengan cara merekrut Sarjana (S.1) bidang studi yang belum terserap untuk dijadikan guru SD dengan terlebih dahulu dilatih tentang pendidikan ke- SD – an, dalam jangka waktu tertentu

DAFTAR PUSTAKA

- Bagian Data dan Informasi Pendidikan Set. Ditjen Baga Islam Depag. (2003). *Statistik Pendidikan: Madrasah Negeri dan Swasta Indonesia Tahun Pelajaran 2002-2003*. Jakarta: Depag
- Banghart, Frank W and Albert Trull Jr., (1973), *Educational Planning*, New York: The Macmillan Company
- Bapadal, I. (2003). *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Castetter, Wiliam B. (1996), *The Human Resources Function in Educational Administration*, Six Ed. New Jersey: A Simon & Schuster Company
- Dally, D. (2004). "Penghargaan Rp 1 juta/orang Bagi Guru-guru di Pelosok". *Pikiran Rakyat* (26 November 2004).
- Depdiknas. (2004). *Status Guru*. Jakarta: Dikdasemen
- Depdiknas. (2002). *Standar Kompetensi Guru Kelas SD-MI*. Jakarta: Dikti
- Depdiknas. (2001). *Kelayakan, Kebutuhan, dan Tambahan Guru SD di Indonesia Tahun 1999/2000*. Jakarta: Balitbangdiknas.

- _____ (2004). *Proyeksi Pendidikan Formal dan Non Formal Indonesia Tahun 2003/2004 – 2010/2011*. Jakarta: Balitbang Depdiknas.
- _____ (2004). *Proyeksi Penduduk Indonesia Menurut Usia Tahun 2000-2010*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balibang Depdiknas.
- _____ (2004). *Statistik Persekolahan SD 2003/2004*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balibang Depdiknas.
- _____ (2003). *Statistik Persekolahan SD 2002/2003*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balibang Depdiknas.
- _____ (2002). *Statistik Persekolahan SD 2001/2002*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balibang Depdiknas.
- _____ (2001). *Statistik Persekolahan SD 2000/2001*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balibang Depdiknas.
- _____ (2000). *Statistik Persekolahan SD 1999/2000*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balibang Depdiknas.
- Elia, H. (2004). *"Mengangkat Harkat Guru dengan Sertifikasi Profesi"*. *Kompas* (12 November 2004).
- Fortunato, R.T. (1981). *Personnel Administration in Higher Education*. Washington: Jossey-Boss Publisher.
- Gaffar, M. Fakry, (1980) *The Demand and The Supply of Secondary School Teacher in West Java Indonesia*, University of Northern Colorado.
- Handoko, H.T. (1990). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Jalal, Fasli. dan Supriadi, Dedi. (2000). *Reformasi Pendidikan dalam Menyambut Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adi Cita.
- Kartadinata, Sunaryo. (2004). *Senja Kala Profesi Guru, Pikiran Rakyat*. (Rabu 24 November 2004)
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dsar di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Keputusan Mendiknas Nomor 0854/O/1989 tanggal 30 Desember 1989 berisi tentang : Kualifikasi peningkatan persyaratan awal guru SD menjadi jenjang D-II, sehingga tanggung jawab penyelenggaraannya beralih ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Kompas. *Depdiknas Siapkan 80.000 Guru Bantu..* (Sabtu 06 Desember 2003)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Setneg
- Pikiran Rakyat, *190.000 Guru Diangkat? Kaum Pendidik Menanti Pemerintah Pusat.* (Kamis 08 April 2004)
- Proyek Statistik dan Informasi Pendidikan. (2002). *Analisis Kebutuhan Guru dalam Rangka Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 Tahun.* Jakarta: Depdiknas.
- Suara Merdeka, *Dianggap Diskriminatif, Pengangkatan Guru SD 2004.* (Senin 29 Maret 2004)
- Sudaryanto.(2004). *Guru Bantu Sekaligus Bermutu dalam Didaktika,* Kompas (05 Januari 2004).
- Subdit PGSD Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi. (2004). *Profil D-II dan S-1 PGSD.*
- Sunaryo Kartadinata, 2004, *Senja Kala Profesi Guru,* Pikiran Rakyat Rabu 24 November 2004 hal. 8.
- Supriadi, D. (2004). *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan.* Bandung: Rosda Karya
- Supriadi, D. (1998). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru.* Yogyakarta: Adicitya Karya Nusa
- Surya, M. (2004). "Guru Bantu, Antara Solusi dan Polusi". *Pikiran Rakyat* (25 November 2004).
- Surya, M. (2003). *Percikan Perjuangan Guru.* Semarang: Aneka Ilmu

Syaefuddin, A. (2003).
*Pengelolaan Tenaga
Kependidikan*. Bandung:
Adpend

Synthesis. Dakar : World
Education Forum.

The World Bank, EAPRO.
(1988). *Education in
Indonesia: From Crisis to
Recovery*. Jakarta:
EAPRO.

**Penulis adalah Suryadi, S.Pd.
Dosen tetap Jurusan
Administrasi Pendidikan FIP
UPI. Saat ini Menjabat
sebagai Sekretaris Labora-
torium Jurusan Administrasi
Pendidikan FIP UPI.**

The World Bank. 2004.
*Education in Indonesia :
Managing the Transition
to Desentralization*.
Volume 1 . Jakarta :
Indonesia Education
Sector Review and
Publication.

The World Bank. 2004.
*Education in Indonesia :
Managing the Transition
to Desentralization*.
Volume 2 . Jakarta :
Indonesia Education
Sector Review and
Publication.

--oo0oo--

Tim Pokja Pendidikan
Berkelanjutan. (2001).
Pendidikan Berkelanjutan.
Paper (Kertas Kerja).
Jakarta: DEPDIKNAS.

Undang-undang RI No. 20
Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan
Nasional. Bandung:
Fokusmedia.

UNESCO. (2000). *Education
for All 2000 Assessment*

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN

**(Kajian Pada Sekolah Menengah Umum di Dinas Pendidikan
Kota Bandung)**

Oleh : Dedy Achmad Kurniady

Abstrak

Persoalan seputar pendanaan pendidikan sangatlah kompleks, karena bukan saja disebabkan keterbatasan alokasi anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), tetapi dana yang ada belum dapat dipergunakan sepenuhnya untuk mencapai sasaran pendidikan yang telah ditetapkan. Sumber pendapatan bagi sekolah umum, yang lebih dominan berasal dari orang tua dan pemerintah. Dana yang diperoleh dari orang tua biasanya berupa DSP dan SPP/BP3/Dewan Sekolah, yang dipergunakan untuk proses kegiatan pembelajaran kurikuler dan ekstrakurikuler, sedangkan penerimaan dari pemerintah biasanya berupa gaji pegawai, UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan)/OPF/DBO/DIK untuk kegiatan rutin belajar mengajar, dan yang berupa proyek adalah BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu), BIS (Bantuan Imbal Swadaya), BBE/Life Skill (Broad Base Education and Life Skill), serta Block Grant.

Kata Kunci : Manajemen Pembiayaan, Kualitas Pendidikan

I. Pendahuluan

Pendidikan nasional dihadapkan kepada masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua.

Masalah kualitas terdesak oleh pemikiran kuantitas, terlebih pada masa krisis ekonomi dimana daya dukung ekonomi keluarga semakin melemah yang mengakibatkan banyak usia sekolah tidak dapat melanjutkan sekolah.

Berdasarkan prespektif ekonomi, pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mempunyai kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi lulusan pendidikan secara langsung dapat memenuhi angkatan kerja di berbagai sektor ekonomi. Dengan bekerjanya mereka, pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi.

Sedangkan menurut perspektif pendidikan melihat kualitas pendidikan dari sisi pengadaan dari proses belajar mengajar dan dari segi kemampuan lulusan dalam hal

memecahkan masalah dan berfikir kritis

Kualitas dari segi proses mengandung arti efektifitas atau kesepakatan dan efisiensi keseluruhan faktor-faktor atau unsur-unsur yang berperan dalam proses pendidikan. Dengan demikian kualitas pendidikan akan menghasilkan lulusan yang berbeda pada tingkat kualitasnya.

Pendidikan yang berkualitas dan perluasan kesempatan belajar yang efektif dan efisien akan dapat dicapai apabila tersedia biaya yang mencukupi. Untuk menyediakan berbagai sumber dan fasilitas yang dibutuhkan, sehubungan dengan kualitas yang diharapkan, relevansinya harga tidaklah murah. Oleh karenanya, proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menuntut tersedianya alokasi dana yang besar dan menuntut pelaksanaan manajemen yang baik.

Untuk lebih spesifik dan sesuai dengan latar belakang masalah dan fenomena yang dilihat dari penelitian dilapangan, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :
“Bagaimana Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Kualitas

Pendidikan”, maka dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian sehubungan dengan rumusan permasalahan yaitu :

1. Sistem penganggaran pembiayaan pendidikan yang diterapkan pada sekolah menengah umum ?
2. Seberapa kuat pengaruh antara manajemen pembiayaan pendidikan dengan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Umum (SMU)?

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap kenyataan-kenyataan yang tengah berlangsung yang merupakan suatu masalah yang harus segera diatasi melalui suatu analisis yang bersifat mendalam. Penelitian ini bertolak dari konsep yang memandang manusia sebagai faktor utama dalam manajemen. Tegasnya faktor manusia adalah hal yang mutlak, tidak ada manajemen tanpa adanya manusia. Manusia menjadi titik tolak pusat dalam manajemen dibandingkan dengan benda-benda.

Seperti yang diungkapkan dalam objek penelitian, bahwa pokok

permasalahan yang diteliti adalah bersumber dari dua hal yaitu pembiayaan pendidikan sebagai variabel bebas (variabel x) dan kualitas pendidikan sebagai variabel terikat (variabel y). Untuk melengkapi serta mempertajam analisa, variabel x atau variabel bebas (pembiayaan pendidikan) akan diuraikan menjadi 3 sub variabel berdasarkan 3 dimensi pembiayaan pendidikan, sedangkan variabel terikat hanya diuraikan kedalam 1 sub variabel, secara rinci operasional variabel untuk menjawab identifikasi masalah dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Aspek/Dimensi
Planning (Perencanaan : X1)	Ketepatan dalam alokasi penerimaan dan pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan tujuan - Kebijakan/Keputusan - Prosedur - Metode - Program - Anggaran
Implementing (Pelaksanaan : X2)	Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian tujuan - Usaha (Kesungguhan) - Kesadaran/ Sukarela - Menggerakkan
Controlling (Pengawasan : X4)	Kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan standar pelaksanaan - Menilai Pelaksanaan - Tindakan Korektif
Quality of Education (Kualitas Pendidikan : Y)	<ul style="list-style-type: none"> - Keadaan atau suasana sekolah - Kondisi Pendukung - Proses Belajar Mengajar 	<ul style="list-style-type: none"> - Harapan/Tujuan - Tata tertib dan disiplin - Organisasi /Kurikulum - Penghargaan dan insentif - Kepemimpinan yang efektif - Kemampuan mengajar - Kesesuaian anggaran - Lama siswa dalam kampus/tingkat kelulusan - Lama waktu belajar - Variasi dalam strategi mengajar - Frekuensi tugas yang dibawa ke rumah - Frekuensi penilaian dan umpan balik

Strategi analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Alat analisis yang digunakan untuk menghitung pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis jalur (*path analysis*).

Jumlah sample yang diambil adalah 60 orang yang terdiri dari Kepala SMA Negeri dan Swasta.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem penganggaran pembiayaan pendidikan yang diterapkan pada sekolah menengah umum

Pada prinsipnya masih berpedoman kepada kebijakan pemerintah, dimana dimaksudkan untuk mengetahui dengan jelas berapa kebutuhan untuk kegiatan operasional sekolah dalam satu tahun pelajaran bagi kegiatan penyelenggaraan kurikuler dan ekstrakurikuler, serta ditunjukkan pula bagi perawatan/pengadaan sarana/prasarana dan fasilitas sekolah. Dimana didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Yang merupakan keseluruhan pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun pelajaran.

Sumber APBS berasal dari Biaya Rutin Daftar Isian Kegiatan (DIK) dari APBN, DBO (Dana Bantuan Operasioanal) Proyek, DSP (Dana Sumbangan Pendidikan) yang berasal dari orang tua, dan Dana Sumbangan Dewan Sekolah yang berupa sumbangan orang tua/wali peserta didik yang dibayar secara rutin setiap bulannya (SPP). Serta terdapat pula sumbangan dari orang tua/wali peserta didik atau hibah yang tidak mengikat.

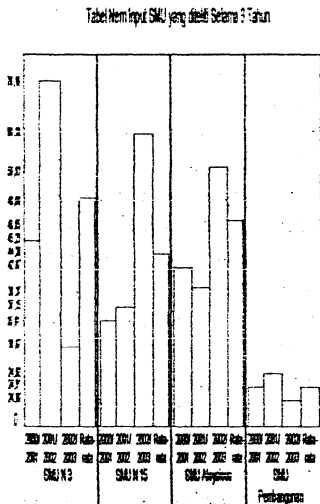
Setelah memperoleh alokasi besarnya Dana, selanjutnya sekolah menetapkan berapa biaya yang diperlukan, berapa biaya yang tersedia dan berapa biaya sumbangan yang diperlukan untuk dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dimana dapat diperoleh peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dapat terlihat dengan disusunnya Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Pada dasarnya penyusunan anggaran merupakan negosiasi antara pimpinan beserta para bawahannya serta melibatkan dewan sekolah. Setelah RAPBS tersebut disahkan selanjutnya diajukan kepada Dinas Pendidikan Kota

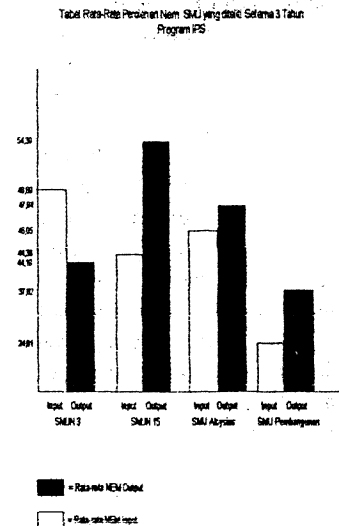
Bandung untuk mendapatkan persetujuan program.

Apabila disetujui, maka dapat direalisasikan dan langsung diserahkan kepada setiap sekolah. Jadi, sekolah menetapkan besarnya alokasi dana yang akan dikeluarkan pada proses pendidikan sesuai yang telah disusun dalam RAPBS/APBS, yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Sekolah, Kepala Sekolah, dan pemerintah yang bersangkutan, yaitu dinas pendidikan.

Dibawah ini gambaran umum dari NEM Input dan Output serta Biaya yang dikeluarkan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang diteliti.



Dengan melihat pada tabel diatas, maka input siswa setiap sekolah sangat bervariasi dari segi kemampuannya, hal ini dibuktikan dengan jumlah NEM input rata-rata dari setiap sekolah yang sangat bervariasi. Dari hasil tersebut, maka dalam penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sekolah yang rata-rata nem inputnya tinggi yaitu ada pada SMU Negeri 3, dengan jumlah NEM Input rata-rata sebesar 48,69, artinya sekolah tersebut mempunyai potensi yang lebih baik dari segi kualitas dibandingkan dengan sekolah yang lain.



Berdasarkan pada tabel rata-rata NEM Input dan Output, untuk program IPS,

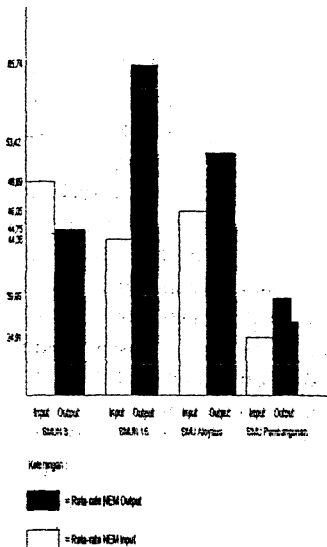
maka persentase hasil perolehan NEM Otput yang dihasilkan oleh setiap sekolah berdasarkan pada NEM Inputnya adalah :

1. SMU N 3
 $44,19 - 48,69 = - 4,5$
 $=$
 $\frac{-4,5}{48,69} \times 100 = 9,24\%$
2. SMU N 15
 $54,39 - 44,38 = 10,01$
 $=$
 $\frac{10,01}{44,38} \times 100 = 22,55$
 $\%$
3. SMU Aloysius
 $47,04 - 46,05 = 0,99 =$
 $\frac{0,99}{46,05} \times 100 = 2,15\%$
4. SMU Pembangunan
 $37,62 - 24,91 = 12,71$
 $=$
 $\frac{12,71}{24,91} \times 100 = 51,02\%$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh setiap siswa dalam suatu persekolahan untuk program IPS dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan pada sekolah

yang diteliti yaitu SMU N 15 sebesar 22,55 %, SMU Aloysius sebesar 2,15 % dan SMU Pembangunan sebesar 51,02 %. Tetapi kenaikan biaya tersebut tidak berpengaruh untuk SMU N 3, hal ini terlihat jelas dalam tabel bahwa kenaikan biaya tersebut menjadikan penurunan hasil proses pembelajaran yaitu sebesar 9,24 %. Walaupun terjadi penurunan untuk hasil proses pembelajaran, hasil lulusannya dapat hampir 90 % dapat diterima di PTN. Hal tersebut terjadi kemungkinan disebabkan bukan proses pembelajarannya di sekolah tetapi setiap siswa mempunyai motivasi yang kuat untuk belajar mandiri.

Tabel Rata-Rata Perolehan Nem Smu yang diteliti Selama 3 Tahun Program IPA



Berdasarkan pada tabel rata-rata Nem Input dan Output, untuk program IPA, maka persentase hasil perolehan NEM Otput yang dihasilkan oleh setiap sekolah berdasarkan pada NEM Inputnya adalah :

$$\begin{aligned}
 5. \quad & \text{SMU N 3} \\
 & 44,75 - 48,69 = - 3,94 \\
 & = \\
 & \frac{- 3,94}{48,69} \times 100 = 8.09\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6. \quad & \text{SMU N 15} \\
 & 65,74 - 44,38 = 21,36 \\
 & =
 \end{aligned}$$

$$\frac{21,36}{44,38} \times 100 = 48,13\%$$

$$\begin{aligned}
 7. \quad & \text{SMU Aloysius} \\
 & 53,42 - 46,05 = 7,37 = \\
 & \frac{7,37}{46,05} \times 100 = 16,00\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 8. \quad & \text{SMU Pembangunan} \\
 & 39,05 - 24,91 = 14,14 \\
 & = \\
 & \frac{14,14}{24,91} \times 100 = 56,76\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh setiap siswa dalam suatu persekolahan untuk program IPA dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan pada sekolah yang diteliti yaitu SMU N 15 sebesar 48,13 %, SMU Aloysius sebesar 16,00 % dan SMU Pembangunan sebesar 56,76 %. Tetapi kenaikan biaya tersebut tidak berpengaruh untuk SMU N 3, hal ini terlihat jelas dalam tabel bahwa kenaikan biaya tersebut menjadikan penurunan hasil proses pembelajaran yaitu sebesar 8,09 %. Walaupun terjadi penurunan untuk hasil proses pembelajaran, hasil lulusannya dapat hampir 90 % dapat diterima di PTN. Hal tersebut terjadi kemungkinan

disebabkan bukan proses pembelajarannya di sekolah tetapi setiap siswa mempunyai motivasi yang kuat untuk belajar mandiri.

Daftar Tabel Satuan Biaya Rata-Rata Per Siswa Selama 3 (Tiga) Tahun

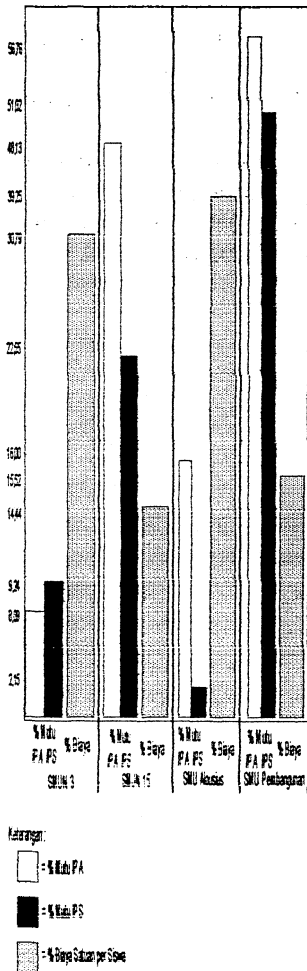
No	Nama Sekolah	Besarnya Satuan Biaya Selama Tiga Tahun	Persentase
1.	SMU N 3	Rp. 3.337.452	30,79 %
2.	SMU N 15	Rp. 1.565.462	14,44 %
3.	SMU Aloysius	Rp. 4.254.296	39,25 %
4.	SMU Pembangunan	Rp. 1.682.352	15,52 %
	Jumlah Total	Rp. 10.839.562	100 %

untuk menghasilkan proses pendidikan yang berkualitas adalah sebesar :

1. SMU N 3 sebesar 30,79 %
2. SMU N 15 sebesar 14,44 %
3. SMU Aloysius sebesar 39,25 %
4. SMU Pembangunan sebesar 15,52 %

Berdasarkan pada tabel satuan biaya rata-rata siswa selama 3 (tiga) tahun, maka persentase biaya yang dikeluarkan oleh setiap sekolah

Tabel Persentase Perolehan Biaya Pendidikan dan Nilai Pendidikan (Rata-rata NEM) SMU yang diadiri Sekolah 3 Tahun Berdasarkan Satuan Biaya per Siswa per Tahun



Berdasarkan pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing sekolah, dalam menetapkan besarnya biaya satuan per

siswa sangat bervariasi, hal ini disebabkan karena faktor kebutuhan untuk masing-masing sekolah dalam meningkatkan kualitas proses pendidikannya berbeda.

Jika kita bandingkan antara besarnya biaya yang diperlukan dengan hasil proses pendidikan pada setiap sekolah sangat bervariasi, hal ini terbukti bahwa untuk SMU N 3, biaya yang dikeluarkan untuk proses pembelajaran sebesar 30,79 % dengan hasil proses pendidikan yang diperoleh untuk program IPA sebesar 8,09 % dan program IPS sebesar 9,24 %.

Pada SMU N 15, biaya yang dikeluarkan untuk proses pembelajaran sebesar 14,44 %, dengan hasil proses pendidikan yang diperoleh untuk program IPA sebesar 48,13 % dan program IPS sebesar 22,55 %.

Pada SMU Aloysius, biaya yang dikeluarkan untuk proses pembelajaran sebesar 39,25 %, dengan hasil proses pendidikan yang diperoleh untuk program IPA sebesar 16,00 % dan program IPS sebesar 2,15 %.

Pada SMU Pembangunan, biaya yang dikeluarkan untuk proses pembelajaran sebesar 15,52 %, dengan hasil proses pendidikan yang diperoleh untuk program

IPA sebesar 56,76 % dan program IPS sebesar 51,76 %.

Atas dasar hasil perhitungan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya yang dibutuhkan relatif besar hanya dapat menghasilkan keluaran kualitas (yang diukur dengan rata-rata NEM) lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan relatif kecil dapat menghasilkan keluaran kualitas yang relatif baik. Hal ini terbukti pada sekolah SMU N 3 dan SMU Aloysius, dimana biaya per siswa yang dikeluarkan oleh setiap siswa sangat besar yaitu sekitar 30,79 % dan 39,25 %, tetapi hanya dapat menghasilkan keluaran kualitas proses pendidikan sebesar : program IPA = 8,09 % dan program IPS = 9,24 % (untuk SMU N 3), dan untuk SMU Aloysius hanya dapat menghasilkan keluaran kualitas pendidikan sebesar 16,00 % untuk program IPA dan sebesar 2,15 % untuk program IPS.

Sedangkan pada sekolah SMU N 15 dan SMU Pembangunan biaya yang dibutuhkan relatif kecil yaitu masing-masing sebesar 14,44 % dan 15,52 %, tetapi dapat menghasilkan keluaran kualitas proses pendidikan yang relatif lebih baik yaitu sebesar program IPA = 48,13 % dan Program IPS = 22,55 % untuk

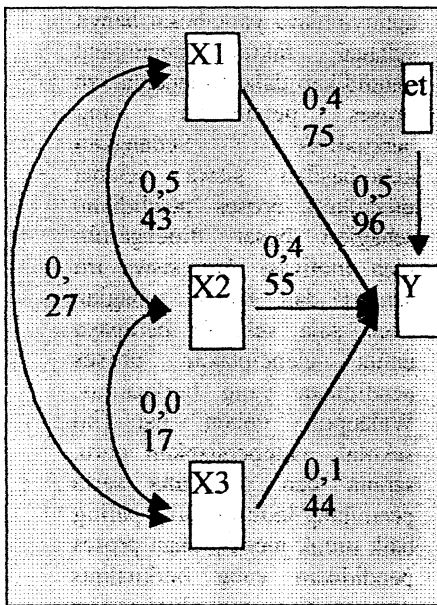
SMU N 15, dan untuk SMU Pembangunan dapat menghasilkan keluaran kualitas pendidikan masing-masing untuk program IPA sebesar 56,76 % dan untuk program IPS sebesar 51,02 %.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya yang besar belum tentu dapat menghasilkan proses pendidikan yang berkualitas, artinya biaya yang besar hanya sebagai faktor penunjang pendidikan dalam menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. Sedangkan keberhasilan siswa selama mengikuti proses pendidikan sebagian besar dipengaruhi oleh motivasi dari siswa itu sendiri dan hanya sebagian kecil saja sekolah berupaya untuk menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. Walaupun dalam hal ini sekolah mempersiapkan guru, sarana dan prasarana serta penunjang lainnya yang paling baik untuk menciptakan proses pendidikan yang berkualitas dengan ditunjang dana yang besar dalam menjalankan proses pendidikannya.

2. Seberapa kuat pengaruh antara manajemen pembiayaan pendidikan dengan kualitas pendidikan

di Sekolah Menengah Umum (SMU)?

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh manajemen pembiayaan terhadap kualitas pendidikan, dimana manajemen pembiayaan dijadikan 3 sub variable yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan, maka alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*Path analysis*), yang hasilnya yaitu :



Gambar : Jalur Hubungan antara variabel Independen dengan dependen

Dari gambar jalur tersebut diatas terdapat struktur yang menyatakan hubungan kausal dari X_1 , X_2 , dan X_3 , ke Y .

Persamaan yang digunakan untuk struktur diatas adalah :

$$Y = P_{YX_1}X_1 + P_{YX_2}X_2 +$$

$$P_{YX_3}X_3 + \epsilon$$

Dari gambar tersebut, langkah selanjutnya menghitung besarnya pengaruh secara proporsional (individu) X_1 (Perencanaan), X_2 (Pelaksanaan), dan X_3 (Pengawasan) ke Y (Mutu Pendidikan), yaitu dengan cara :

1. Menghitung pengaruh X_1 (Perencanaan) terhadap Y (Mutu Pendidikan)

- a. Pengaruh langsung $\rho_{YX_1}^2 = (0,475)^2 = 0,208849$ atau (20,88 %)

- b. Melalui $X_2 = \rho_{YX_1} \cdot r_{X_1X_2} \cdot \rho_{YX_2}$
 $(0,475) \cdot (0,543) \cdot (0,455) = 0,117399$ atau (11,74 %)

- c. Melalui $X_3 = \rho_{YX_1} \cdot r_{X_1X_3} \cdot \rho_{YX_3}$
 $(0,475) \cdot (0,2781) \cdot (0,144) = 0,09022$ atau (1,90 %)

- Pengaruh Totalnya = $0,208 + 0,117 + 0,019 = 0,3453$ atau (34,53 %)

2. Menghitung pengaruh X_2 (Pelaksanaan) terhadap Y (Mutu Pendidikan)

- a. Pengaruh langsung $\rho_{YX_2}^2 = (0,455)^2$

$$^2=0.207025 \text{ atau } (20,70 \%)$$

b. Melalui $X_1 = \rho_{YX_2} \cdot r_{X_1X_2} \cdot \rho_{YX_1}$
 $(0,455) \cdot (0,543) \cdot (0,475)$
 $= 0,117399 \text{ atau } (11,74 \%)$

c. Melalui $X_3 = \rho_{YX_2} \cdot r_{X_2X_3} \cdot \rho_{YX_3}$
 $(0,455) \cdot (0,0174) \cdot (0,144) =$
 $0,001140 \text{ atau } (0,14 \%)$

• Pengaruh Totalnya =
 $0,207 + 0,117 + 0,001$
 $= 0,3256 \text{ atau } (32,56 \%)$

3. Menghitung pengaruh X_3 (Pengawasan) terhadap Y (Mutu Pendidikan)

a. Pengaruh langsung $\rho_{YX_3}^2 = (0,144)^2 =$
 $0,020736 \text{ atau } (2,07 \%)$

b. Melalui $X_1 = \rho_{YX_3} \cdot r_{X_1X_3} \cdot \rho_{YX_1}$
 $(0,144) \cdot (0,2781) \cdot (0,475) = 0,018822$ atau
 $(1,88 \%)$

c. Melalui $X_3 = \rho_{YX_2} \cdot r_{X_2X_3} \cdot \rho_{YX_1}$
 $(0,144) \cdot (0,0174) \cdot (0,455) =$
 $0,001140 \text{ atau } (0,11 \%)$

• Pengaruh Totalnya =
 $0,0207 + 0,0188 +$
 $0,0011$

Selanjutnya menghitung pengaruh X_1 (Perencanaan), X_2 (Pelaksanaan), X_3 (Pengawasan) secara

simultan terhadap Y (Mutu Pendidikan), yaitu :

$$Y = \text{Total } (X_1) + \text{Total } (X_2) + \text{Total } (X_3)$$

$$Y = 0,34527 + 0,3256 + 0,0406$$

$$Y = 0,711532 \text{ atau } (71,15 \%)$$

Setelah diketahui nilai Y , langkah selanjutnya mencari tingkat kesalahan (error), atau seringkali disebut dengan *Variable Intervening*, yaitu dengan cara :

$$\hat{\epsilon} = 1 - Y$$

$$\hat{\epsilon} = 1 - 0,711532$$

$$\hat{\epsilon} = 0,288468 \text{ atau sebesar } 28,85 \%$$

Kesimpulan :

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) diketahui bahwa variabel bebas memberikan pengaruh yang besar terhadap variabel terikat yaitu sebesar $0,711532$ atau $(71,15 \%)$ terhadap mutu pendidikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar variabel bebas menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat.

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan uji F , maka di dapat F hitung =

28,7576 dan F tabel = 4,04 pada taraf kesalahan 0,05 (5%). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, jadi terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Jadi :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Perencanaan (X1) terhadap mutu pendidikan (Y), yang dapat dirumuskan sebagai berikut
Statistik uji yang digunakan adalah uji t dari perhitungan di dapat t hitung untuk $X_1 = 2,695101$ dan t tabel = 2,021 pada taraf kesalahan 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, jadi terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X1 terhadap Y.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Pelaksanaan (X2) terhadap mutu pendidikan (Y), yang dapat dirumuskan sebagai berikut
Statistik uji yang digunakan adalah uji t dari perhitungan di dapat t hitung untuk

$X_2 = 6,636419$ dan t tabel = 2,021 pada taraf kesalahan 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, jadi terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X2 terhadap Y.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Pengawasan (X3) terhadap mutu pendidikan (Y), yang dapat dirumuskan sebagai berikut
Statistik uji yang digunakan adalah uji t dari perhitungan di dapat t hitung untuk $X_3 = 2,053966$ dan t tabel = 2,021 pada taraf kesalahan 5% (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, jadi terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X3 terhadap Y.

Dengan melihat dari uji t tersebut, berarti sub hipotesis yang menyatakan bahwa dimensi Perencanaan (X1), Pelaksanaan (X2), dan Pengawasan (X3), secara parsial mempunyai pengaruh yang dominan

terhadap mutu pendidikan dapat diterima.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan pendidikan, suatu lembaga seharusnya memperhatikan karakteristik, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dimana layanan tersebut dilakukan. Maka perlu mempertimbangkan perumusan kebijakan dan keputusan-keputusan pendidikan tidak hanya berorientasi pada masa kini yang pragmatis, akan tetapi perlu berorientasi ke masa depan yang mampu memenuhi tuntutan jangka panjang.
2. Program penyelenggaraan pendidikan akan berkualitas apabila ditunjang dengan dana yang memadai, sehingga akan mempengaruhi perluasan kesempatan

belajar yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menuntut alokasi dana yang besar dan menuntut manajemen yang baik.

3. Pola perencanaan dan pelaksanaan harus selalu dilakukan pengevaluasian dalam menjalankan setiap program-program yang telah disusun dan dilaksanakannya, hal tersebut berguna untuk mencari hambatan-hambatan yang terjadi serta untuk memudahkan pemecahan masalah yang harus dilaksanakan pada saat itu juga. Sehingga kualitas pendidikan yang diharapkan akan tercapai.
4. Dalam mengikuti pendidikan atau menyelesaikan pendidikan memerlukan biaya yang tidak kecil. Biaya tersebut merupakan pengeluaran yang harus dikorbankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam mengukur biaya yang dikeluarkan terdapat dua teknik analisis yang biasanya digunakan, yaitu dengan cost benefit analysis dan cost effectiveness analysis.

5. Di lingkungan sekolah menengah umum, besarnya pendapatan dan pengeluaran dapat dilihat dalam APBS, dimana penyusunan APBS tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan untuk satu tahun akademik.
6. Sumber pendapatan bagi sekolah umum, yang lebih dominan berasal dari orang tua dan pemerintah. Dana yang diperoleh dari orang tua biasanya berupa DSP dan SPP/BP3/Dewan Sekolah, yang dipergunakan untuk proses kegiatan pembelajaran kurikuler dan ekstrakurikuler, sedangkan penerimaan dari pemerintah biasanya berupa gaji pegawai, UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan) /OPF/DBO/DIK untuk kegiatan rutin belajar mengajar, dan yang berupa proyek adalah BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu), BIS (Bantuan Imbal Swadaya), BBE/Life Skill (Broad Base Education and Life Skill), serta Block Grant.

B. Saran-Saran

Bagi pihak pengelola pendidikan dan Dewan Sekolah/Komite Sekolah, diharapkan dapat membuat suatu perencanaan yang baik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam perencanaan tersebut perlu memperhatikan aspek-aspek eksternal dan internalnya. Karena hal ini akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar.

Sebaiknya pihak sekolah tidak hanya merencanakan perolehan pendapatannya dari pihak pemerintah dan orang tua siswa, tetapi harus dapat mengikutsertakan peran Dewan Sekolah/Komite Sekolah untuk mendapatkan tambahan dana bagi pengembangan proses pembelajarannya, sehingga harapan setiap pihak untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai.

Diharapkan pula bagi pihak sekolah, anggaran yang tidak dapat seluruhnya direalisasikan oleh pemerintah (jika perolehannya berasal dari sumbangan pemerintah) jangan sampai seluruhnya dibebankan kepada orang tua siswa, tetapi sekolah harus dapat mencari

pemecahannya dengan cara memberdayakan Dewan Sekolah/Komite Sekolah, karena aturan baku yang ada menjelaskan bahwa Dewan Sekolah harus dapat membantu dan mengembangkan program yang dibuat oleh pihak sekolah.

Agar manajemen pembiayaan pendidikan dapat dilaksanakan dengan optimal, diharapkan prosedur dalam pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan jangan terlalu birokratis dan banyak interupsi dari pihak-pihak yang kurang berkompeten. Akibat yang dapat ditimbulkan oleh permasalahan tersebut akan berdampak buruk bagi pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abin Syamsudin Makmun, (1996). *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*. Program Pasca Sarjana IKIP Bandung.
-
- (1999). *Pemberdayaan Sistem Perencanaan dan Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Kearif Peningkatan Kualitas Kerja Pendidikan Yang Diharapkan*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan UPI. Bandung.
- Achmad Sanusi, (2002). *Studi Pengembangan Model: Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan*. Departemen Pendidikan Nasional. UPI. Bandung.
- Ai Sutriansih, (2002). *Efektivitas Sistem Pengelolaan Biaya Pendidikan dalam Menunjang Peningkatan Kualitas*. UPI Bandung.
- Blaug, Mark, (1970). *Economics of Education*. The Penguin Press.
- Bowen, R. Howard, (1981). *The Costs of Higher Education*. Jossey-Bass Publishers.
- Bray, Mark & Thomas Murray R., (1998). *Financing of Education In Indonesia*. Asian Development Bank. Comparative Education Research Centre. The University of Hongkong.
- Biro Perencanaan, (2000). *Perencanaan Pembangunan Pendidikan*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

- Cohen, Louis & Manion Lawrence, (1994). *Research Methods in Education*. Fourth edition, Routledge, London and New York.
- Cohn, Elchanan, (1979). *The Economics of Education*, Revised Edition, Balinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts.
- Coombs, H. Philip & Hallak Jacques, (1972). *Managing Educational Cost*, Oxford University Press.
- Dedi Supriyadi, (2003), *Satuan Biaya Pendidikan, Dasar dan Menengah*, Cetakan Pertama, Cv. Rosda Karya, Bandung.
- DEPDIKBUD, (1988). *Penelitian Pendidikan Suatu Pengantar*. Dirjen Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Jakarta.
- DEPDIKNAS, (2001). *Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Proyek Peningkatan Sistem Evaluasi Nasional. Jakarta.
- Donmoyer, Robert, Imber Michael, Scheurich J.J., (1995), *The Knowledge Base in Educational Administration*, The State University of New York Press.
- Engkoswara, (2001). *Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah*, Yayasan Amal Keluarga.
- Engkoswara & Ibrahim R., (1995) *50 Tahun Pendidikan dan Prospeknya Terhadap Pembangunan Bangsa Dalam PJP II*. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia.

- (2000). *Manajemen Berbasis Sekolah*. CV. Andira Bandung.
- Fasli Jalal & Dedi Supriadi, (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita Karya Nusa. Yogyakarta.
- FPIPS, (2002). *Manajerial: Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi Pengembangan SDM*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Froomkin, T. Joseph, Jamison T. Dean, Radner Roy, (1976) *Education as an Industry*. National Bureau of Economic Research, Inc., by Ballinger Publishing Company, Cambridge, Mass.
- Glasser, William, (1992). *The Quality School: Managing Students Without Coercion*. Harper Perennial.
- Guskey, R. Thomas, Huberman Michael, (1995). *Profesional Development In Education: New Paradigms and Practices*. Teachers College, Columbia University. New York and London.
- Harun Al-Rasyid, (1999). *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala Program Pasca Sarjana*. UNPAD, Bandung.
- Hough, R. J., (1981). *A Study of School Costs*. NFER Nelson Publishing Company.
- Hoy, K. Wayne, Miskel G. Cecil, (2001). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. McGraw Hill.
- Johns, L. Roe, Morphet L. Edgar, (1975). *The Economics and Financing of Education: A System Approach*. Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- J
ohnson, L. Sandra, Rush C. Sean, (1995). *Reinventing The University: Managing and Financing Institutions of Higher*

- Education*. Coopers & Lybrand L.L.P. John Wiley & Sons, Inc.
- Johns, L. Roe, Morphet L. Edgar, Alexander Kern, (1983). *The Economics & Financing of Education*. Fourth Edition. Prentice-Hall, Inc., Engelwood Cliffs, New Jersey 07632.
- Jones, H. Thomas, (1985). *Introduction To School Finance: Technique and Social Policy*. Macmillan Publishing Company, New York.
- Lightfoot, Lawrence Sara, (1983). *The Good High School: Potraits of Character and Culture*. Basic Books, Inc., Publishers – New York.
- Lipham, M. James, Rankin E. Robb, Hoeh A. James (1985). *The Principalship: Concepts, Competencies, and Cases*. Longman Inc., New York & London
- Mohammad Fakry Gaffar, (2000). *Pembiayaan Pendidikan: Permasalahan dan Kebijakan Dalam Perspektif Reformasi Pendidikan Nasional. Kohvensi Nasional Pendidikan Indonesia IV*. Jakarta 19-22 September 2000.
- (1992). *Pembuatan Keputusan: Konsep, Prinsip dan Proses*. IKIP Bandung.
- Penulis adalah Dedy Achmad Kurniady, M.Pd. – Dosen tetap Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI.**

--oo0oo--